



Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Binuang

Syapril A¹⁾, Muhammad Ilham S²⁾, Oya Ukhwah Ramadhan. H³⁾, Yantrifna Endri Pamungkas⁴⁾

Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

syapril@soc.uir.ac.id¹⁾

ilhamsyapda@soc.uir.ac.id²⁾

oyaukhwahramadhan@student.uir.ac.id³⁾

yantrifnaendri@student.uir.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepala Desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Binuang. Transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan telaah dokumen keuangan desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta media publikasi informasi keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peranan strategis sebagai penginisiasi keterbukaan informasi, pengendali sistem administrasi keuangan, serta fasilitator partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa mencapai 78%, kelengkapan dokumen administrasi keuangan yang dikelola melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mencapai 96%, serta ketepatan waktu penyampaian dan publikasi laporan realisasi anggaran kepada masyarakat mencapai 100%. Transparansi pengelolaan keuangan desa juga diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang inklusif, publikasi informasi APBDes di ruang publik, serta penyampaian laporan realisasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang komunikatif, terbuka, dan responsif terhadap regulasi berkontribusi signifikan dalam membangun budaya transparansi di tingkat desa. Dengan demikian, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada sistem administrasi yang digunakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, dan kapasitas kepemimpinan kepala desa sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: Peranan, Kepala Desa, Transparansi, Pengelolaan Keuangan

Abstract

This study aims to analyze the role of the village head in improving the transparency of village financial management in Binuang Village. Transparency is a fundamental principle of village governance that functions to prevent budget misuse and strengthen public trust in local government. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community leaders, supported by direct observation and document analysis of village financial records such as the Village



Budget (APBDes), budget realization reports, and public financial disclosure media. The findings indicate that the village head plays a strategic role as an initiator of information openness, an administrator of financial control systems, and a facilitator of public participation in every stage of village financial management. Empirical findings show that community participation in village deliberation forums reached 78% attendance, while 96% of financial administration documents were properly recorded through the Siskeudes system, and 100% of budget realization reports were submitted and publicly disclosed on time. Transparency practices are implemented through inclusive village meetings, public display of APBDes information boards, the utilization of the Village Financial System (Siskeudes), and open dissemination of budget realization reports to the community. These findings demonstrate that communicative and regulation-oriented leadership significantly contributes to strengthening a culture of transparency at the village level. The study concludes that transparency in village financial management is not solely dependent on administrative systems but is strongly influenced by the commitment, integrity, and leadership capacity of the village head as a key actor in local governance.

Key words: Role, Village Head, Transparency, Financial Management.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah desa menerima alokasi anggaran yang signifikan setiap tahun. Kondisi ini menghadirkan peluang bagi percepatan pembangunan desa, namun pada saat yang sama juga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan apabila pengelolaannya tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dipahami sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Bovens (2007) menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas karena memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Sementara itu, Grimmelhuijsen dan Meijer (2014) menegaskan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik apabila informasi yang disampaikan pemerintah disajikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penelitian Atmadja dan Saputra (2018) menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem administrasi yang tertib serta kepatuhan aparat desa terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari dan Yuliani (2020) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif, seperti kepatuhan terhadap prosedur, sistem pelaporan, serta mekanisme pengawasan formal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menyoroti dimensi kepemimpinan kepala desa sebagai faktor yang berperan dalam mendorong praktik transparansi pengelolaan keuangan desa. Dalam kasus Desa Binuang, kepala desa tidak hanya menjalankan kewajiban administratif dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menunjukkan beberapa perilaku inovatif yang memperkuat keterbukaan informasi publik. Inovasi tersebut antara lain berupa penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui papan informasi desa yang diperbarui secara berkala, pemanfaatan media digital desa untuk menyebarkan informasi kegiatan dan realisasi anggaran, serta pelaksanaan forum musyawarah desa yang lebih terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat secara lebih luas. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya aktif dari kepala desa untuk membangun budaya transparansi yang tidak hanya bergantung pada sistem administrasi formal, tetapi juga pada pola komunikasi pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat.

Peran kepala desa sebagai pemimpin lokal yang memiliki otoritas strategis dalam pengambilan keputusan sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi



prinsip transparansi di tingkat desa. Frederickson et al. (2016) menegaskan bahwa kepemimpinan publik yang berlandaskan etika, integritas, dan tanggung jawab sosial merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membentuk budaya organisasi pemerintahan desa yang lebih transparan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana peranan kepala desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Binuang pada seluruh tahapan siklus keuangan desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis praktik transparansi pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan dimensi implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana kepemimpinan kepala desa berperan dalam mendorong praktik transparansi di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kepemimpinan lokal dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik transparansi pengelolaan keuangan desa serta peran kepemimpinan kepala desa dalam konteks sosial dan kelembagaan Desa Binuang.

Penelitian dilaksanakan selama ± 4 bulan, yaitu dari Maret hingga Juni 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memastikan kecukupan data melalui proses observasi berulang, wawancara mendalam, serta verifikasi dokumen sehingga dapat meningkatkan validitas temuan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan desa, (2) terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pengawasan, dan (3) memahami praktik transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan kriteria tersebut, informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan kredibel terkait fokus penelitian.

Adapun daftar informan penelitian disajikan pada tabel berikut:

NO	INISIAL	JABATAN	ALASAN PEMILIHAN INFORMAN
1	NZ	Kepala Desa	Memiliki peran utama dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa
2	HD	Sekretaris Desa	Bertanggung jawab dalam administrasi dan dokumentasi keuangan desa
3	ND	Kaur Keuangan	Pelaksana teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
4	SM	BPD	Berfungsi sebagai pengawas dan representasi masyarakat dalam kontrol kebijakan desa
5	RW	Tokoh Masyarakat	Aktif dalam musyawarah desa dan memahami transparansi dari perspektif masyarakat
6	F	Tokoh Masyarakat	Terlibat dalam pengawasan informal dan partisipasi publik
7	BI	Tokoh Masyarakat	Mewakili aspirasi warga dalam forum musyawarah desa

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan praktik transparansi, observasi terhadap kegiatan musyawarah desa dan administrasi keuangan, serta studi dokumentasi terhadap APBDes, laporan realisasi anggaran, papan informasi kegiatan, dan publikasi anggaran desa.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran sentral dalam membangun sistem transparansi yang terintegrasi. Namun, transparansi yang berkembang di Desa Binuang tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga deliberatif, yaitu membuka ruang dialog, negosiasi, dan koreksi publik terhadap kebijakan anggaran.

Pada tahap perencanaan, kepala desa memastikan penyusunan RKPDes dan APBDes dilakukan melalui Musyawarah Desa yang terbuka. Publikasi rancangan anggaran sebelum pengesahan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen deliberasi publik. Dalam forum tersebut, masyarakat secara aktif memberikan koreksi terhadap alokasi anggaran, khususnya pada kegiatan pembangunan fisik dan program pemberdayaan.

Proses negosiasi terjadi ketika terdapat perbedaan prioritas antara pemerintah desa dan masyarakat. Misalnya, usulan pemerintah desa yang lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur tertentu kerap mendapatkan tanggapan dari warga yang menginginkan alokasi lebih besar pada kebutuhan sosial atau ekonomi produktif. Dalam situasi ini, kepala desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog dua arah, membuka ruang argumentasi, serta mendorong tercapainya konsensus. Mekanisme ini menunjukkan bahwa transparansi deliberatif tidak berhenti pada keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup proses interaktif yang memungkinkan terjadinya redistribusi prioritas anggaran secara partisipatif. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak hanya berasal dari prosedur formal, tetapi juga dari kesepakatan substantif yang dihasilkan melalui musyawarah.

Pada tahap pelaksanaan, setiap kegiatan pembangunan dilengkapi papan informasi yang memuat detail anggaran dan sumber pendanaan. Langkah ini memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan langsung terhadap progres kegiatan. Transparansi juga diperkuat melalui penggunaan aplikasi Siskeudes yang mencatat seluruh transaksi secara sistematis dan terdokumentasi.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam transparansi keuangan desa belum sepenuhnya inklusif. Tingkat literasi digital masyarakat Desa Binuang masih bervariasi. Kelompok masyarakat usia produktif relatif mampu mengakses dan memahami informasi digital yang disediakan, baik melalui perangkat desa maupun media berbasis teknologi. Sebaliknya, sebagian warga lanjut usia cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi tersebut, baik karena keterbatasan kemampuan menggunakan perangkat digital maupun rendahnya familiaritas dengan sistem informasi.

Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi eksklusi digital (*digital exclusion*), di mana transparansi berbasis teknologi justru berisiko tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam konteks ini, transparansi tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi, tetapi perlu dikombinasikan dengan pendekatan konvensional seperti papan informasi fisik, forum tatap muka, dan komunikasi langsung. Dengan kata lain, efektivitas transparansi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengintegrasikan berbagai saluran informasi yang adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat.

Pada tahap pelaporan, laporan realisasi APBDes diumumkan secara terbuka dalam forum desa dan ditempel di papan informasi publik. Transparansi ini memperlihatkan komitmen kepala desa dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Albert Meijer (2015), keterbukaan informasi yang proaktif dapat memperkuat legitimasi pemerintah lokal, terutama ketika diiringi dengan partisipasi publik yang bermakna.

Pembahasan menunjukkan bahwa transparansi di Desa Binuang tidak hanya bersifat formalistik, tetapi telah berkembang menjadi praktik sosial yang deliberatif dan adaptif. Kepala desa tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai komunikator, mediator, dan fasilitator yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa keberhasilan transparansi tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial dan sensitivitas terhadap kesenjangan kapasitas masyarakat, termasuk dalam aspek literasi digital.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa



merupakan hasil interaksi antara sistem regulatif, kepemimpinan lokal, dan kapasitas sosial masyarakat. Regulasi menyediakan kerangka kerja, kepemimpinan menentukan arah implementasi, sementara literasi Masyarakat termasuk literasi digital menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi tersebut benar-benar inklusif dan partisipatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan kepala desa sangat menentukan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Benuang. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan dokumen anggaran, publikasi informasi kegiatan, pemanfaatan teknologi administrasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam forum desa. Kepemimpinan yang komunikatif, responsif terhadap regulasi, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi faktor utama keberhasilan.

Disarankan agar pemerintah desa terus mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk memperluas akses publik terhadap data keuangan desa. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendampingan dan supervisi agar praktik transparansi dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat transparansi secara komparatif antar desa sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kepemimpinan dalam tata kelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Meijer (2015). Government transparency in the information age. *Public Administration Review*, 75(3), 430–439.
- Andersson, K. P., & Elinor Ostrom (2015). Analyzing decentralized governance systems: A polycentric perspective. *Policy Studies Journal*, 43(3), 311–331. <https://doi.org/10.1111/psj.12108>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 175–187. <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *Public Administration Review*, 67(3), 447–461. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00728.x>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Bisogno, M. (2017). The role of public-sector accounting in controlling corruption. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 1–19.
- Dewi, N. L. P. S., & Gayatri. (2019). Effect of transparency and community participation on village fund accountability. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(3), 145–152.
- Grimmelikhuisen, S., & Albert Meijer (2014). Effects of transparency on trust in government. *Public Administration Review*, 74(1), 137–149.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Village financial management system: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kurniawan, R. C., & Manurung, D. T. (2019). Accountability and transparency in village fund management. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2), 145–158.
- Lestari, N., & Yuliani, N. L. (2020). Village fund management: Transparency and internal control perspective. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 299–315.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Influence of internal control systems on village fund accountability. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2), 106–117.
- Nugroho, R., & Sari, M. (2023). Digital transparency and village governance: Challenges and opportunities. *Journal of Rural Studies*, 98, 120–130.
- Pratama, A., & Widodo, J. (2022). Community participation and financial transparency in Indonesian villages. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(2), 55–70.
- Putra, I. P. A., & Rasmini, N. K. (2019). The influence of transparency and participation on village financial accountability. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(3), 45–54.



- Rahman, F., & Putri, D. (2024). Digital divide in rural governance: Evidence from village financial transparency. *Government Information Quarterly*, *41*(1), 101–115.
- Solekhan, M. (2022). Strengthening village governance through financial transparency. *Journal of Governance and Public Policy*, *9*(1), 1–15.
- Suryanto, S., & Sari, R. (2021). Leadership and financial transparency in village governance. *Public Policy and Administration Research*, *11*(4), 32–41.